

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan salah satu strategi pembangunan nasional dalam memadukan beberapa aspek antara lain aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan fisik yang implementasinya harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing wilayah. Banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengembangan wilayah yang terkadang kurang sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, sehingga masyarakat tidak menerima perencanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu faktor **keberhasilan pengembangan wilayah** yaitu **pengembangan kelembagaan** oleh karena itu pengembangan kelembagaan perlu memperoleh perhatian khusus yang melibatkan banyak pihak. Menurut Syahyuti (2007) secara teoritis dua perhatian utama dalam pengembangan kelembagaan yaitu koordinasi dan sinkronisasi.

Sektor pertanian (secara umum) merupakan salah satu dari sembilan sektor ekonomi yang ada dimana sektor pertanian merupakan penggerak ekonomi masyarakat khususnya diwilayah pedesaan. Sektor yang semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan penggerak utama pembangunan sektor ini, namun pada kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya dicapai. Kenyataan yang banyak dijumpai semenjak zaman orde baru hingga saat ini nasib petani belum berada pada kondisi ideal seperti yang diharapkan bahkan petani seringkali menjadi korban dari suatu kebijakan yang ada pada sektor pertanian tersebut.

Ada beberapa informasi terkait dengan pertanian dan perikanan yang dikutip dari Triadmodjo (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai wilayah yang sangat luas terutama diluar jawa yang bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian.

2. Luas wilayah lautan juga sangat besar dengan sumberdaya kelautan melimpah.
3. Sebagai negara agraris dan juga sebagai negara maritim, jumlah petani dan nelayan banyak.
4. Tenaga ahli dibidang pertanian dan perikanan cukup banyak. Keberadaan sekolah dan perguruan tinggi dibidang pertanian dan perikanan yang meluluskan banyak tenaga ahli.
5. Sektor pertanian tidak membutuhkan teknologi tinggi dan para petani mempunyai pengalaman bertani sejak jaman nenek moyang. Berbeda dengan industri mobil, kapal, pesawat terbang, dan sejenisnya yang membutuhkan teknologi tinggi.
6. Profesi petani dan nelayan sudah ada sejak jaman nenek moyang dan mempunyai cukup banyak pengalaman dibidang tersebut.
7. Jumlah penduduk sangat besar dan akan terus bertambah yang semuanya membutuhkan pangan.

Berdasarkan beberapa informasi diatas, seharusnya bisa menjadikan pertanian dan perikanan maju dan masyarakat yang ada pada sektor tersebut hidup sejahtera, dan pemerintah dapat menjadikan potensi tersebut untuk kemajuan bangsa ini.

Dalam perkembangannya, terlaksananya suatu kegiatan usaha tani tidak terlepas dari peran serta unsur- unsur kelembagaan yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Banyaknya konsep usaha tani yang berkembang selama ini sehingga memerlukan dukungan beberapa lembaga terkait dengan pengembangan modal, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi dalam budidaya, serta pengembangan jaringan pemasaran. Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian besar petani di Indonesia terutama dalam hal permodalan dan kualitas sumberdaya sehingga petani sangat membutuhkan bantuan dari lembaga pembiayaan, lembaga penelitian, dinas terkait dalam pengembangannya.

Kelembagaan lokal merupakan kelembagaan yang tumbuh pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama dan dengan tujuan yang sama. Salah satu kelembagaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan yaitu kelembagaan

petani. Pada dasarnya kelembagaan petani ini hadir diharapkan dapat menjadi penggerak sistem agribisnis dan memperkuat posisi tawar petani, namun pada kenyataannya hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan. Menurut Suradisastra (2008) berbagai permasalahan yang masih melekat pada petani dan kelembagaan petani di Indonesia sehingga keberadaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Fakta yang sering dijumpai adalah walaupun suatu wilayah memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, namun kesejahteraan petani tidak mengalami peningkatan, keuntungan yang besar justru dinikmati oleh pedagang. Kelembagaan yang ada pada sektor pertanian seharusnya memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan petani. Selama ini masih terdapat kesenjangan antara kelembagaan yang dibentuk secara *top down* oleh Pemerintah, dengan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tani (Togbe et al, 2012 dalam Fitria). Pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan usahatani, terutama kelompok petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar (Wahyuni, 2003 dalam Fitria). Dari beberapa kondisi Secara administrasi kelembagaan yang terbentuk secara *top down* memberikan hasil sesuai yang diharapkan, namun pada kenyataannya keberhasilan tersebut hanya bersifat *artificial*.

Kenyataan selama ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pemberian bantuan kepada petani ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Pada dasarnya permasalahannya lebih disebabkan oleh sistem kelembagaan yang ada pada sektor pertanian (secara umum) baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan petani itu sendiri yang belum berfungsi dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrul (2012) mengenai pengembangan kelembagaan pertanian, menyatakan bahwa pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional dalam tiga pilar kelembagaan, yaitu: (1) kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksis dalam komunitas (*voluntary sector*); (2) kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka; dan (3) kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan tingkat

publik (*public sector*). Olehnya itu, tiga pilar kelembagaan seperti yang disebutkan diatas harus berjalan beriringan.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengambil contoh pada sektor perikanan, dimana sebagian besar wilayah kabupaten Banggai Kepulauan masih menunjukkan karakteristik pedesaan. Sebagaimana kondisi topografi yang berupa kepulauan, Sektor primer utama yang berkembang di wilayah ini adalah perikanan dan kelautan, sehingga dominasi kawasan pedesaanpun diwarnai oleh potensi perikanan dan kelautan yang melimpah. Potensi yang berlimpah di sektor ini namun belum sepenuhnya didukung oleh kinerja kelembagaan yang baik terutama kelembagaan yang bersifat lokal.

Meskipun secara statistik PDRB sektor pertanian (secara umum) kabupaten Banggai Kepulauan lebih besar dibandingkan 8 sektor ekonomi lainnya, namun belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Tingginya produktivitas sektor pertanian (secara umum) di kabupaten Banggai Kepulauan tidak menjadi jaminan akan memberikan keuntungan yang layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan antara petani dengan pelaku agribisnis pada sektor hulu- hilir. Beberapa hal yang bisa menjadi objek kajian adalah sektor perikanan yang masih menjadi subsistem dari sektor pertanian di kabupaten Banggai Kepulauan ternyata berpotensi menyumbang nilai tukar nelayan (NTN) yang lebih tinggi dari nilai tukar petani (NTP). Dengan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perikanan serta lembaga lokal yang aktif mendorong terciptanya penguatan ekonomi masyarakat lokal, diyakini sektor perikanan mampu menyumbang PDRB melebihi sektor pertanian.

Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011 – 2016 yaitu “mengembangkan struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal”. Meski Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam disektor pertanian (secara umum) yang besar dan lebih khususnya pada sektor perikanan budidaya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (2013) bahwa potensi lahan pembudidayaan rumput laut sekitar 21.792 hektar

sementara yang baru terolah sekitar 36,38 persen. Kemudian untuk pembudidayaan ikan kerapu/ napoleon potensi lahan yang ada sekitar 265 hektar sementara yang baru terolah sekitar 3,77 persen.

Berdasarkan data tersebut kebijakan pemerintah kabupaten untuk menetapkan sasaran program pembangunan disektor perikanan didasarkan pada pertimbangan potensi sumberdaya alam yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan khususnya sumberdaya lahan yang masih cukup tersedia untuk digarap. Salah satu permasalahan pembangunan sektor pertanian (secara umum) yaitu permasalahan sumberdaya manusia, baik sebagai tenaga kerja selaku obyek maupun subyek pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Kualitas tenaga kerja disektor pertanian di pedesaan pada umumnya sangat rendah. Masyarakat petani dipedesaan kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya terbiasa hidup tergantung dari alam dan bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Pembentukan PDRB menurut harga konstan tahun 2009 – 2013 paling besar disokong oleh sektor pertanian yang meliputi 5 (lima) subsektor, seperti pada tabel I.1.

TABEL I.1
PDRB KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 2009 – 2013 (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*	2013**
1. PERTANIAN	190.043	202.709	216.130	230.440	245.312
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2.350	2.576	2.818	3.087	3.375
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	20.115	21.666	23.434	25.313	27.397
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.227	1.354	1.509	1.655	1.809
5. BANGUNAN	4.879	5.423	5.993	6.609	7.276
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	110.831	122.816	136.037	150.403	166.590
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	26.989	29.621	32.753	36.503	40.464
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	14.719	16.121	17.672	19.342	21.228
9. JASA-JASA	48.844	53.573	58.074	62.767	67.905
Jumlah	419.996	455.860	494.419	536.119	581.355

Sumber : Kab. Banggai Kepulauan dalam Angka (2014)

Dilihat dari tabel diatas, sumbangan PDRB pada sektor pertanian selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan, ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor potensial di kabupaten Banggai Kepulauan yang presentasinya

mencapai 47% dari total PDRB. Melihat besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB, maka pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa mengabaikan sektor ini. Pada wilayah yang sektor industrinya belum berkembang seperti kabupaten Banggai Kepulauan, kegiatan ekonomi masyarakat bersumber pada kegiatan sektor primer yaitu sektor pertanian (secara umum). Untuk itu, berkembangnya wilayah ini sangat ditentukan oleh kinerja dari sumberdaya di sektor tersebut. Pendekatan yang ditempuh oleh setiap wilayah dalam mendorong perkembangan wilayah harus didasarkan pada potensi wilayah tersebut dan juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dengan potensi yang ada.

Potensi sektor perikanan khususnya dan sektor pertanian pada umumnya yang besar belum didukung oleh pasar sehingga daya jual hasil pertanian (secara umum) masih rendah. Banyaknya rantai pemasaran hasil budidaya ikan maupun rumput laut menyebabkan harga jual petani semakin rendah (ilustrasi rantai pemasaran dapat dilihat pada bab iii). Para petani/ nelayan menjual hasil usahanya sendiri atau dipasar setempat. Selain itu juga, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sistem ijon di wilayah ini menyebabkan masih lemahnya membangun pranata kelembagaan.

Dalam pengembangan sektor ini pada wilayah penelitian, telah didukung oleh keberadaan kelembagaan baik yang berasal dari pemerintah maupun kelembagaan yang tumbuh pada masyarakat seperti kelompok tani/nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok Simpan pinjam perempuan (SPP), organisasi- organisasi masyarakat, dan lain- lain. Namun demikian pembentukan kelompok tani/ nelayan masih banyak didominasi oleh pemerintah. hal ini dikarenakan pembentukan kelompok ini karena adanya proyek, sehingga dilakukan oleh orang- orang atau golongan tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari kelembagaan yang ada.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu adanya kajian mengenai aspek kelembagaan dalam pengembangan sektor primer dengan studi kasus sektor perikanan. Sehingga pada akhirnya nanti akan diketahui kelembagaan apa saja yang telah berperan dalam pengembangan sektor perikanan. Kajian aspek kelembagaan

pada level sistem tersebut dapat dilihat dari analisis organisasi, sistem regulasi, dan hubungan antar aktor.

Penelitian ini mengambil wilayah di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena sebagian besar desa di Kecamatan Liang berada di pesisir, sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagian petani/nelayan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor perikanan merupakan sektor basis di wilayah tersebut. Selain itu, di kecamatan Liang sudah terdapat berbagai fasilitas penunjang sektor perikanan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan, Pos pengawasan kegiatan sektor perikanan. Dengan adanya fasilitas penunjang tersebut, diharapkan dapat menunjang ekonomi masyarakat pesisir di kecamatan Liang.

1.2 Masalah Penelitian

Pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian usaha yang berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat dimana pengembangannya harus disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam mengembangkan sektor ini masih terdapat berbagai macam masalah yang harus dicari solusi pemecahannya. Salah satu yang menjadi faktor penyebab kurang berkembangnya sektor pertanian yang merupakan sektor potensial yaitu faktor kelembagaan. Pembangunan kelembagaan yang selama ini diterapkan pemerintah dalam sektor pertanian (secara umum) mengacu pada paradigma moderen. Disatu sisi telah mampu meningkatkan perekonomian daerah namun disisi lain belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pada sektor tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi tersebut, namun tidak memberikan hasil yang signifikan.

Posisi, peran dan fungsi kelembagaan kelompok tani/ nelayan seringkali disusun sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan pembangunan wilayah sesuai dengan kebijakan pembangunan setempat. Dalam kondisi demikian kelompok tani diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan dan bukan untuk

kesejahteraan mereka. Kebijakan pembangunan pada sektor pertanian pada saat ini lebih banyak mengakomodir keinginan yang bersifat *bottom up*, namun implementasinya masih diakomodir oleh keinginan yang bersifat *top down* sehingga kelembagaan lokal yang ada belum berfungsi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian diatas, pertanyaan penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu **“bagaimana hubungan kelembagaan terkait kegiatan sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya di Kecamatan Liang?”**

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kelembagaan dalam pengembangan wilayah berbasis sektor pertanian pada level sistem dengan analisis pada sektor perikanan budidaya. Level sistem yang dimaksud berkaitan dengan sistem regulasi, organisasi yang terlibat dan hubungan antar aktor terhadap kegiatan masyarakat sektor perikanan budidaya di Kecamatan Liang, kabupaten Banggai Kepulauan.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

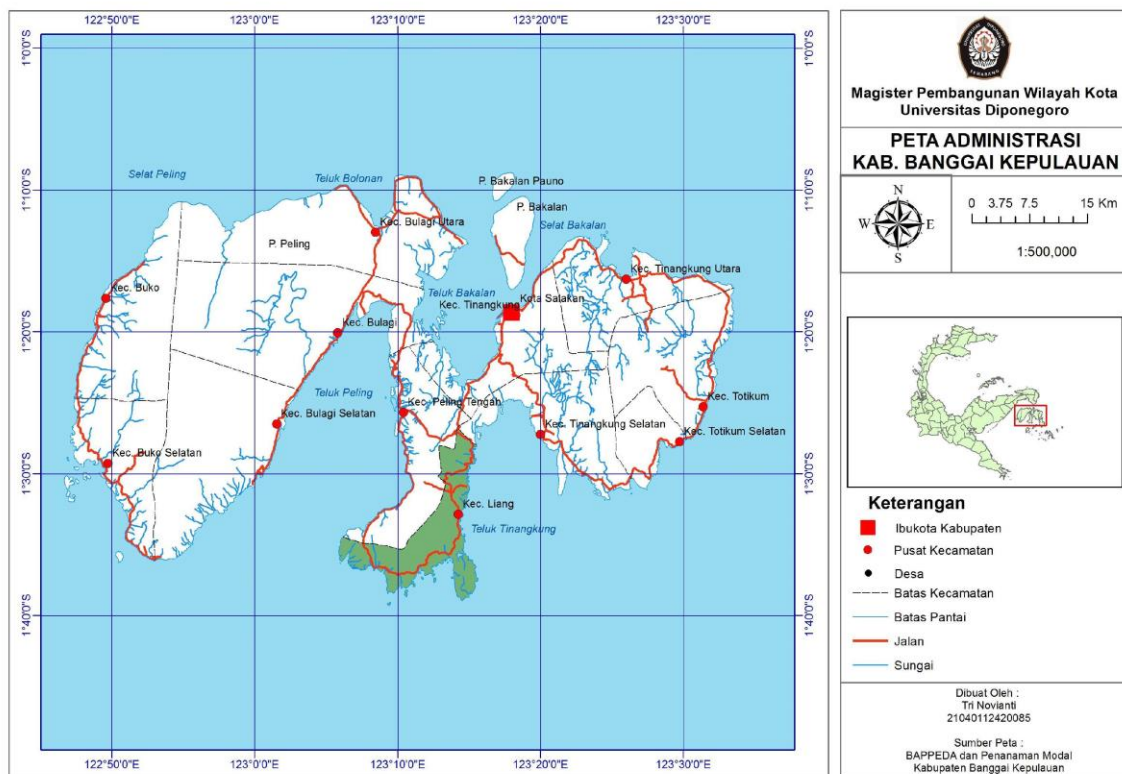
- a. Menganalisis organisasi yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan
- b. Mengkaji sistem regulasi yang mengatur kegiatan pengembangan kelembagaan sektor perikanan
- c. Menganalisis hubungan antar aktor yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan

1.4 Ruang Lingkup

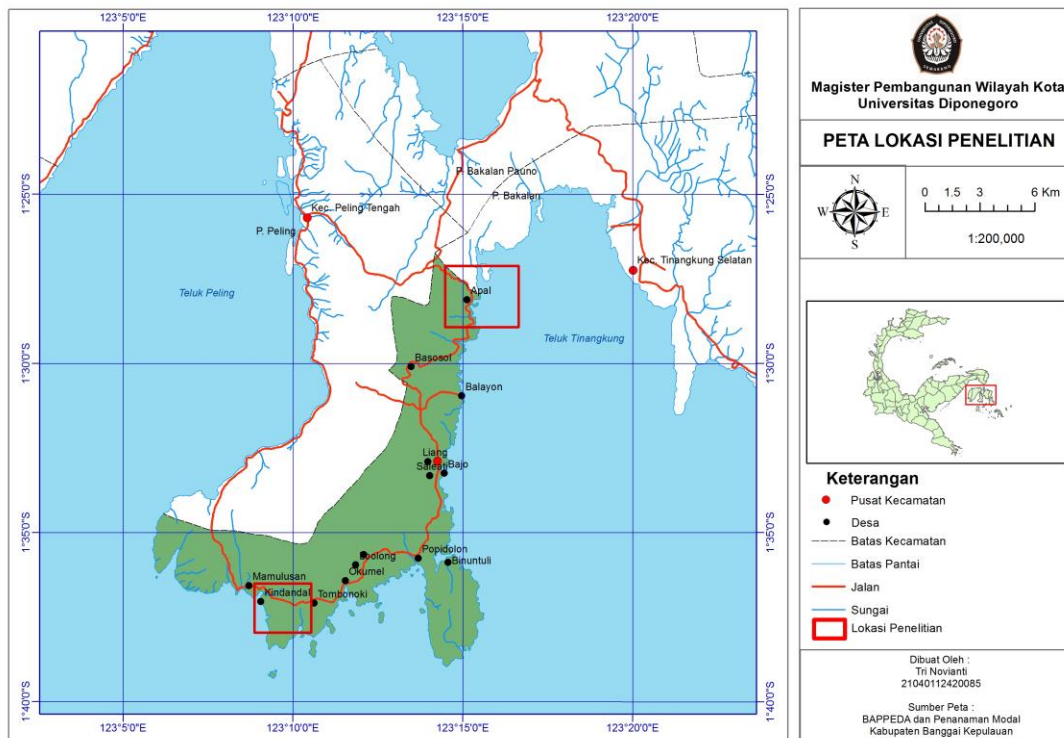
Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lokasi penelitian dan ruang lingkup substansi. Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup tersebut :

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah dengan mengambil sampling dua desa yang ada di kecamatan Liang yaitu desa Apal dan desa Kindandal. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan justifikasi bahwa kecamatan Liang merupakan salah satu kecamatan yang diperuntukan sebagai kawasan budidaya sebagaimana dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil Kabupaten Banggai Kepulauan. Dimana dua desa yang menjadi lokasi khusus dalam penelitian ini merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pembudidaya



GAMBAR 1.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Gambar 1.2
PETA WILAYAH PENELITIAN

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Pembahasan materi yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai aspek kelembagaan pada level sistem. Dalam merumuskan penelitian ini, materi yang akan dibahas dibatasi sesuai dengan sasaran penelitian yang telah dirumuskan. Tata kelola dalam penelitian ini merupakan pandangan dalam mengkaji aspek kelembagaan baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan yang tumbuh dimasyarakat kaitannya dengan kegiatan sektor perikanan. Dengan adanya kelembagaan lokal tersebut manfaat apa yang paling dirasakan oleh masyarakat dan juga bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan yang ada. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kelembagaan Sektor Pertanian

Aspek kelembagaan merupakan salah satu aspek kajian dalam penelitian ini. Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kelembagaan yang sekaligus sebagai suatu organisasi antara lain kelembagaan formal yang berasal dari pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor perikanan maupun kelembagaan non formal dalam hal ini kelembagaan petani yang berada pada tingkat lokal yang berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani/ nelayan yang tergabung dalam suatu kelompok (Uphoff, 1986). Kajian ini digunakan untuk mengetahui peran dari masing- masing lembaga tersebut dalam kegiatan sektor pertanian khususnya perikanan budidaya.

b. Sektor Perikanan Budidaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembudidayaan ikan hidup dan pembudidayaan rumput laut yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang ada pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini sedikit digambarkan tentang proses pembudidayaan sampai ke tahap pemasaran yang ada di wilayah penelitian.

c. Sistem Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu aturan/kebijakan pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan terkait kegiatan kelembagaan sektor perikanan budidaya

- d. Petani pembudidaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat pembudidaya ikan maupun rumput laut yang ada pada wilayah penelitian.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengenai peranan kelembagaan lokal dalam pengembangan wilayah berbasis sektor primer. Adapun keaslian penelitian dapat dilihat pada tabel I.2.

TABEL I.2
KEASLIAN PENELITIAN

Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Teknik Analisis dan Bahan Penelitian	Hasil Penelitian
Peran Kelembagaan Non-formal dalam Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, 2010, Septiyati Ganjarsari	Identifikasi eksistensi kelembagaan non formal terkait dan pengaruh pengembangan sektor pertanian	Pendekatan Campuran, Metode <i>Explonatory Sequential Design</i>	Purposive dan <i>Snowball Sampling</i>	Di Kec. Bandungan telah terdapat Poktan sebagai Kelembagaan non formal namun belum berperan sepenuhnya dalam pengembangan pertanian.
Peranan Kelembagaan dalam Penerapan Eko-Efisiensi di Klaster Pengolahan Ikan Kota Semarang (studi kasus: klaster Lumintu, Krobokan), 2007, Listya Anggraini Ayuningtyas	Mengidentifikasi Peranan Kelembagaan dalam pencapaian eko-efisien	Kualitatif	Analisis Rantai Nilai Produksi	Peran kelembagaan dalam ekoefisien cukup berhasil. Namun, peran dan fungsi suatu lembaga masih simpang siur dengan masih adanya tumpang tindih kepentingan
Peran institusi lokal dalam pengembangan wilayah pesisir (studi kasus: wilayah pesisir kecamatan Kedung-Kabupaten Jepara), 2007, Wiwandari Handayani	Memahami dinamika dan peran institusi dalam upaya pengembangan pesisir	Kualitatif		Institusi lokal yang ada sudah cukup berperan

Sumber : Handayani (2007), Ayuningtyas (2007), Ganjarsari (2010)

Beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- a. Judul : Kelembagaan pengembangan wilayah berbasis sektor pertanian: analisis pada sektor perikanan budidaya di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. Lokasi : Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah dengan analisis pada Kecamatan Liang.
- c. Metode : Observasi Lapangan, wawancara, kajian dokumen

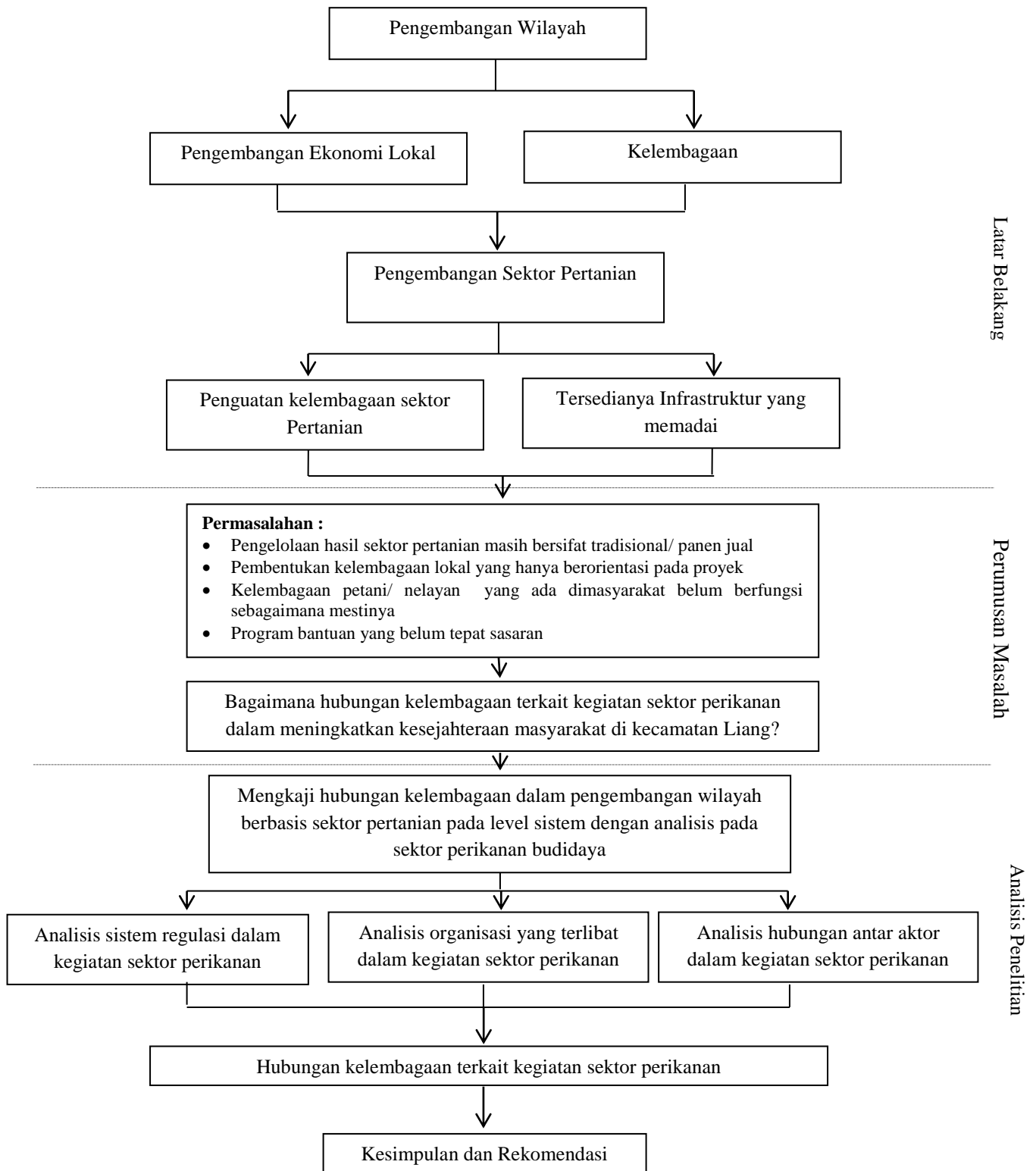
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai topik, lokasi dan aspek penelitian yang berbeda dengan yang penulis teliti. Berdasarkan hal tersebut maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan mengenai kelembagaan khususnya kelembagaan lokal pada sektor primer dan pengembangan wilayah. Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan kinerja dan peranan kelembagaan dalam upaya pengembangan wilayah berbasis sektor primer, sehingga nantinya dapat menjadi stimulus bagi para stakeholder dalam mengembangkan kelembagaan lokal.

1.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan dalam berpikir dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kerangka pikir memuat pentingnya kelembagaan lokal dan pengembangan lokal dalam mengembangkan sektor potensial sebagai salah satu strategi dalam pengembangan wilayah sebagai latar belakang. Kemudian terumuskan permasalahan pengolahan hasil yang masih bersifat tradisional atau panen jual di karenakan diwilayah tersebut belum ada pabrik/industri hasil sehingga berpengaruh juga terhadap taraf hidup masyarakat. Setelah itu terumuskan suatu tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji peranan kelembagaan lokal yang ada guna memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan lokal tersebut dalam upaya pengembangan wilayah berbasis sektor primer (pertanian) dengan serangkaian analisis tertentu untuk memperoleh kesimpulan berupa peranan kelembagaan lokal dalam pengembangan wilayah.



Sumber : Analisis Penyusun, 2014

Gambar 1.3
KERANGKA PIKIR

1.8 Metode Penelitian

Penelitian mengenai aspek kelembagaan dalam pengembangan wilayah berbasis sektor pertanian ini didasari oleh adanya suatu potensi sektor pertanian (secara umum) yang besar pada wilayah penelitian namun kurang didukung oleh faktor kelembagaan khususnya kelembagaan yang bersifat lokal. Dalam fokus pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami aspek kelembagaan khususnya pada level sistem. Level sistem yang dimaksud dalam penelitian ini dengan melihat organisasi yang terlibat, sistem regulasi dan hubungan antar aktor.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini didasari karena penelitian ini mengkaji suatu studi kasus yang melibatkan banyak aktor dan memanfaatkan wawancara untuk menelaah kasus yang ada. Selain itu dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal, artinya selama proses penelitian penulis lebih banyak mengadakan kontak atau berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan mendapatkan data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

1.8.1 Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus ini dengan melakukan pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk memperoleh keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi tertentu, dimana pada metode ini tidak semua individu dalam populasi diamati, melainkan hanya suatu bagian dari populasi, yang disebut contoh atau sampel pengamatan. Adapun informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang kunci (*key person*) yang dipilih secara *purposive sampling* dan dianggap dapat memberikan jawaban yang valid dengan mewakili populasi yang ada. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Pihak Pemerintah Daerah:

1. Bappeda : 2 orang

2. Dinas Kelautan dan Perikanan : 2 orang
3. BKP3 : 2 orang

Masyarakat :

1. Aparat Desa : 3 orang
2. Masyarakat pembudidaya ikan : 4 orang
3. Masyarakat pembudidaya rumput laut : 4 orang

1.8.2 Data Penelitian

Pembahasan mengenai sub bab data penelitian meliputi tentang kebutuhan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data- data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini.

1.8.2.1 Kebutuhan Data

Dalam rancangan survei, dibutuhkan daftar kebutuhan data hal ini untuk mempermudah teknis pelaksanaan dalam pengumpulan data. Kebutuhan data merupakan suatu daftar atau serangkaian data- data yang diperlukan untuk melakukan kajian dan analisis hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang lengkap memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini kebutuhan data yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel I.3.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

No	Variabel	Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan data	Sumber
1	Analisis organisasi yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan fungsi aktor dalam kelembagaan tersebut - Visi/ misi organisasi -Tujuan organisasi -Struktur organisasi -Program kegiatan organisasi -Implementasi kegiatan -Sumber pembiayaan 	Data primer dan sekunder	Telaah dokumen dan wawancara	Lembaga lokal, dislutkan, Bappeda, Badan Penyuluh Perikanan, masyarakat

No	Variabel	Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan data	Sumber
2	Analisis sistem regulasi	-Data peraturan terkait kegiatan sektor perikanan -Kebijakan yang dibuat dalam pengembangan kelembagaan -Ada/ tidaknya sanksi terhadap kebijakan yang dibuat -	Data primer dan sekunder	Survey dan wawancara, telaah dokumen	Lembaga lokal, dislutkan, Bappeda, Badan Penyuluh Perikanan, masyarakat
3	Analisis hubungan antar aktor	- Aktor yang terlibat dalam lembaga lokal - Kegiatan yang dilakukan masyarakat sektor perikanan -	Data primer	Survey dan wawancara.	Lembaga lokal, dislutkan, Bappeda, Badan Penyuluh Perikanan, masyarakat

Sumber : Penyusun, 2014

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data

▪ Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan data primer merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari wilayah studi secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui fakta- fakta yang ada. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan teknik wawancara.

- Observasi Lapangan

Observasi lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta- fakta yang terdapat pada wilayah penelitian. observasi lapangan pada penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Kindandal dan desa Apal. Alat yang digunakan dalam observasi lapangan yaitu alat tulis dan kamera digital untuk memperoleh gambaran deskriptif dan visual mengenai kondisi wilayah penelitian. Hasil dari observasi lapangan berupa catatan dan foto yang menggambarkan permasalahan atau kondisi wilayah penelitian yang ingin disampaikan.

- Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembudidayaan yang termasuk dalam kelompok tani/ nelayan dan

diperkaya dengan tambahan informasi dari aparat desa, instansi yang terkait dengan kegiatan sektor perikanan. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual untuk kebernilaian dari data yang diperoleh.

TABEL I.3
PENKODEAN DATA HASIL WAWANCARA

URAIAN INTERPRETASI	KODE
.....	W/ NS_01/18-20
.....	dst
.....	

Sumber : Penyusun, 2014.

- **Triangulasi**

Dilakukan dengan cara melakukan crosscek antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain untuk menghindari informasi yang bias atau perbedaan data antara yang satu dengan sumber data yang lain.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik triangulasi ini yaitu dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang- orang pada saat penelitian dengan keadaan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

▪ **Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

- **Literatur**

Teknik pengumpulan data ini merupakan penggalian terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan kelembagaan yang mempunyai kaitan dengan pengembangan kelembagaan berbasis sektor primer.

- **Kajian Dokumen**

Kajian dokumen ini merupakan metode pengumpulan data dimana melihat dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kajian dokumen ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan. Dokumen tersebut bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, dan laporan kantor) ataupun

dokumen privat (buku harian, surat, e-mail). Untuk kebutuhan data dapat diperoleh melalui instansi terkait langsung seperti:

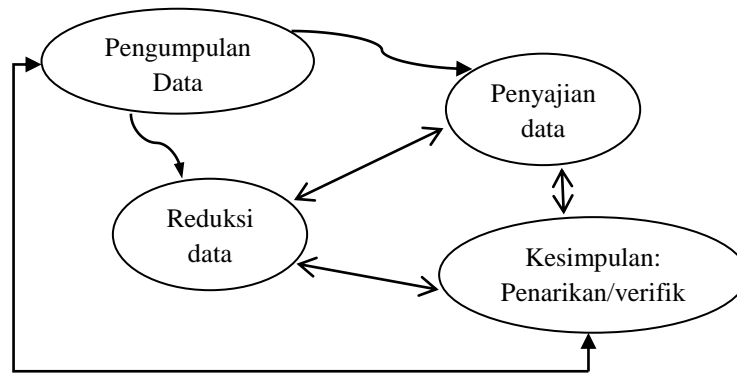
1. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai data jumlah penduduk, data PDRB, struktur perekonomian, dan lain- lain;
2. Data dari Dinas Kelautan dan Peikanan kabupaten Banggai Kepulauan mengenai data jumlah produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya, jumlah kelompok petani/ nelayan, dan lain sebagainya;
3. Data dari Bappeda kabupaten Banggai Kepulauan meliputi arah kebijakan pembangunan kabupaten Banggai Kepulauan maupun program- program pembangunan daerah;
4. Data lain yang mendukung penelitian ini.

Namun yang lebih penting dalam penelitian kualitatif sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu meletakkan manusia sebagai alat atau instrumen. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan- kenyataan yang ada dilapangan, dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya yang mampu memahami kaitan dari kenyataan di lapangan (Moleong: 1989)

1.8.3 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, ketegori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1989). Dalam penelitian ini pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data kualitatif dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen dari lembaga- lembaga yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pengolahan data dilakukan melalui sistem reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).



Sumber: Miles dan Huberman (1984)

GAMBAR 1.4
KOMPONEN- KOMPONEN ANALISIS DATA

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal- hal yang dianggap penting oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan nantinya dituangkan dalam bentuk verbatim wawancara. Verbatim wawancara merupakan salah satu bentuk data mentah yang didapatkan dari para informan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Data dapat disajikan berupa tabel, chart maupun matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan lain sejenisnya. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data diawali dari hasil wawancara dengan para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan. Hal ini karena pertanyaan untuk responden relatif sama. semua data hasil wawancara tersebut dipahami satu persatu kemudian disatukan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan

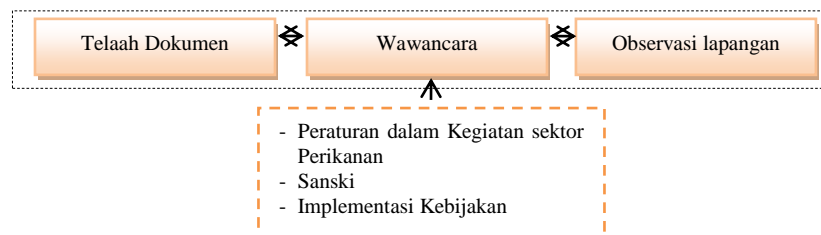
Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, yang harus diuji kebenarannya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal kurang didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan.

1.8.3.1 Proses Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dengan demikian, setelah mendapatkan data, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data sehingga data tersebut mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan. Proses analisis merupakan serangkaian alur yang sistematis dalam melakukan analisis data sekaligus menggambarkan bagaimana input diproses sampai menghasilkan output. Analisis yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara sistematis yang didasarkan pada kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya. Analisis tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian seperti pada tabel berikut:

a. Analisis pertama mengenai sistem regulasi dalam kegiatan sektor perikanan.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu kebijakan atau aturan baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam kelembagaan tersebut. Disamping itu juga apakah aturan atau kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh dalam aktivitas masyarakat. Pada analisis ini dilakukan wawancara kepada instansi terkait tentang ada tidaknya kebijakan yg mendukung kegiatan masyarakat sektor perikanan kemudian dibandingkan dengan dokumen yang ada terkait kebijakan tersebut.

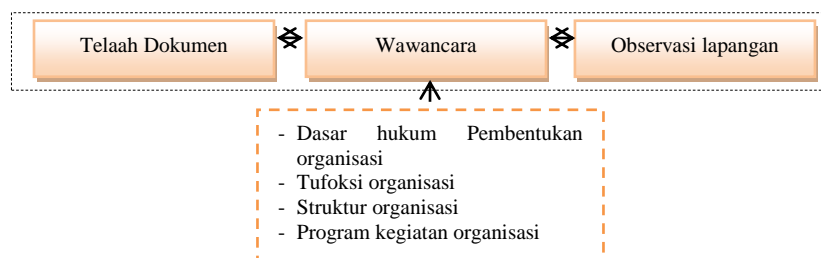


Sumber: Analisis penyusun

GAMBAR 1.5
TAHAP ANALISIS SISTEM REGULASI

b. Analisis kedua mengenai organisasi yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan.

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui organisasi apa saja yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan, dasar hukum pembentukan organisasi, tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut sebagai bahan analisis juga penulis berusaha mencari informasi tentang bagaimana implementasi kegiatan dalam organisasi tersebut apakah program kegiatannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga proses pendanaan yang dikelola oleh organisasi dalam mengembangkan masyarakat sektor perikanan menjadi kajian penting dalam analisis ini. Dalam melakukan analisis ini, selain melakukan telaah dokumen penulis juga melakukan wawancara langsung kepada informan yang penulis anggap dapat memberi jawaban yang valid. Dalam analisis ini juga diperdalam dengan menggali informasi mengenai kinerja lembaga yang dijadikan objek dalam penelitian ini, informasi tersebut baik diperoleh dari wawancara dengan masyarakat langsung maupun dokumen-dokumen yang ada pada lembaga terkait dan observasi lapangan kemudian dilakukan perbandingan. Dalam menganalisis pada organisasi ini, penulis berusaha untuk mengetahui apakah ada persamaan fungsi maupun peran khususnya pada lembaga -lembaga yang akan diteliti.

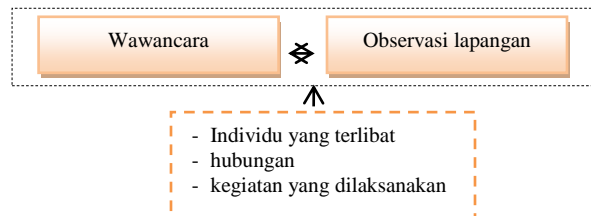


Sumber: Analisis penyusun

GAMBAR 1.6
TAHAP ANALISIS ORGANISASI YANG TERLIBAT

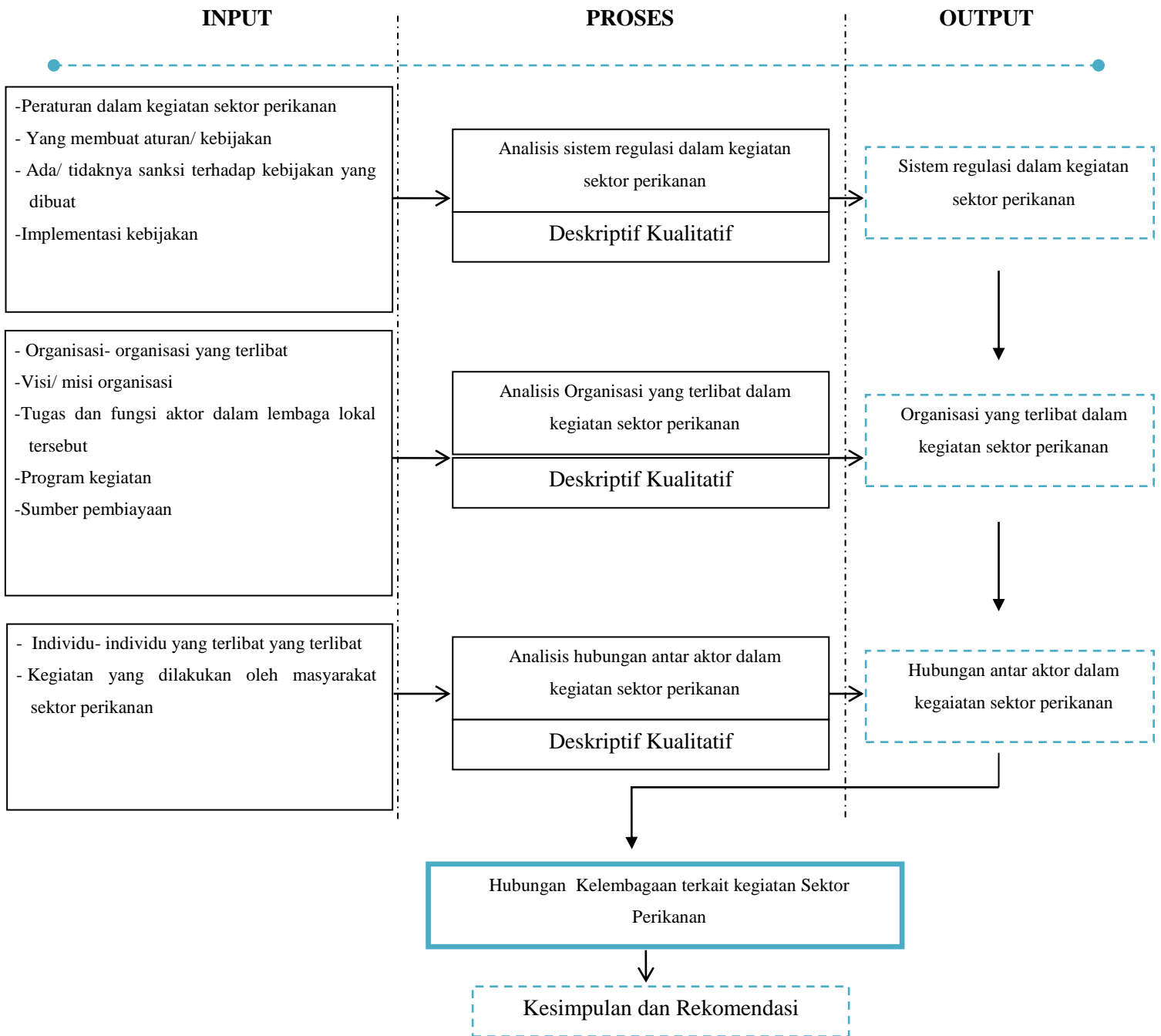
c. **Analisis ketiga mengenai hubungan antara aktor dalam kegiatan sektor perikanan**

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui aktor- aktor yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan, Untuk pengecekan keakuratan data dari para informan penulis berusaha menggali kembali informasi yang penulis dapatkan dari informan sebelumnya kemudian melihat apakah informasi tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan.



Sumber: Analisis penyusun

GAMBAR 1.7
TAHAP ANALISIS AKTOR YANG TERLIBAT



Sumber : Penyusun, 2014

GAMBAR I.8
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang sebagai justifikasi pemilihan kasus dalam penelitian yang digunakan dalam perumusan masalah dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut kemudian digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran penelitian. Dalam bab ini juga memuat ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial dari penelitian yang membatasi kajian penelitian secara wilayah dan materi yang ada, keaslian penelitian, yang berfungsi sebagai pembanding penelitian dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, manfaat penelitian sebagai kontribusi penelitian secara teoritis untuk ilmu perencanaan wilayah dan kota, kerangka pikir sebagai landasan berpikir dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi outline dalam penyusunan Tesis secara sistematis.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi literatur mengenai kelembagaan lokal sebagai objek penelitian dan teori mengenai pengembangan wilayah pedesaan dalam hal ini lebih fokus ke pengembangan lokal dengan basis pada sektor pertanian khususnya sektor perikanan

BAB III GAMBARAN UMUM SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan sektor potensial di wilayah penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan yang terdiri dari tiga analisis yaitu analisis sistem regulasi, analisis organisasi yang terlibat dan analisis hubungan antar aktor

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan dari hasil penelitian